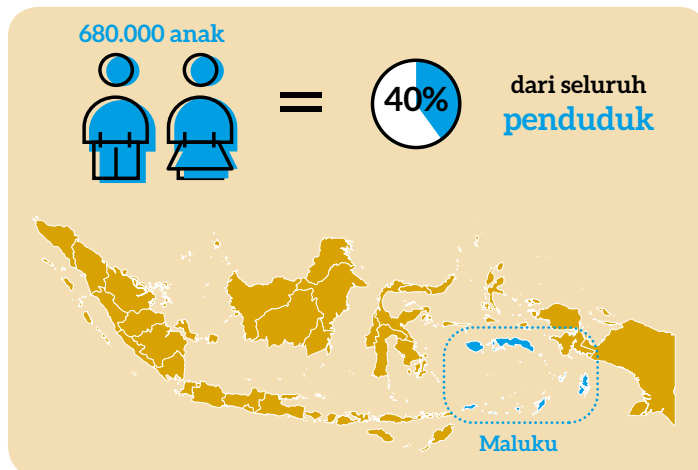




Pendahuluan

Profil singkat provinsi ini menyajikan indikator-indikator prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait anak, berdasarkan survei nasional berbasis rumah tangga dan sumber data lainnya. Profil ini melengkapi *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia* yang disusun oleh BAPPENAS dan UNICEF, untuk mendukung pemantauan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Provinsi Maluku termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 680.000 orang atau 40 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Lebih dari sepertiga anak tinggal di wilayah perkotaan. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDG di provinsi ini.



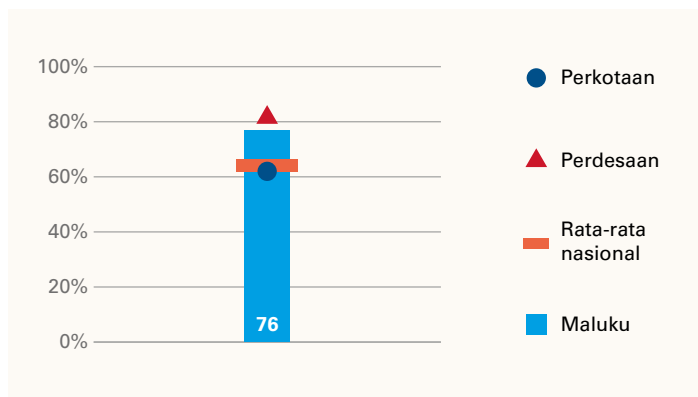
TUJUAN 1 PENGENTASAN KEMISKINAN



Lebih dari 160.000 anak (24 persen) hidup di bawah garis kemiskinan provinsi pada 2015 (Rp 13.139 per orang per hari). Namun, lebih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi rentan dan hidup dengan pendapatan yang sedikit di atas garis kemiskinan. Selain itu, 76 persen anak mengalami deprivasi di dua dimensi kemiskinan non-pendapatan atau lebih, dengan ketimpangan yang mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan.¹

Kondisi kemiskinan anak multidimensi di provinsi Maluku

	Persen	Jumlah
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional	19,5	329.000
Anak-anak < 18 di bawah garis kemiskinan nasional	24,1	164.000
Anak-anak < 18 di bawah dua kali garis kemiskinan	74,0	502.000



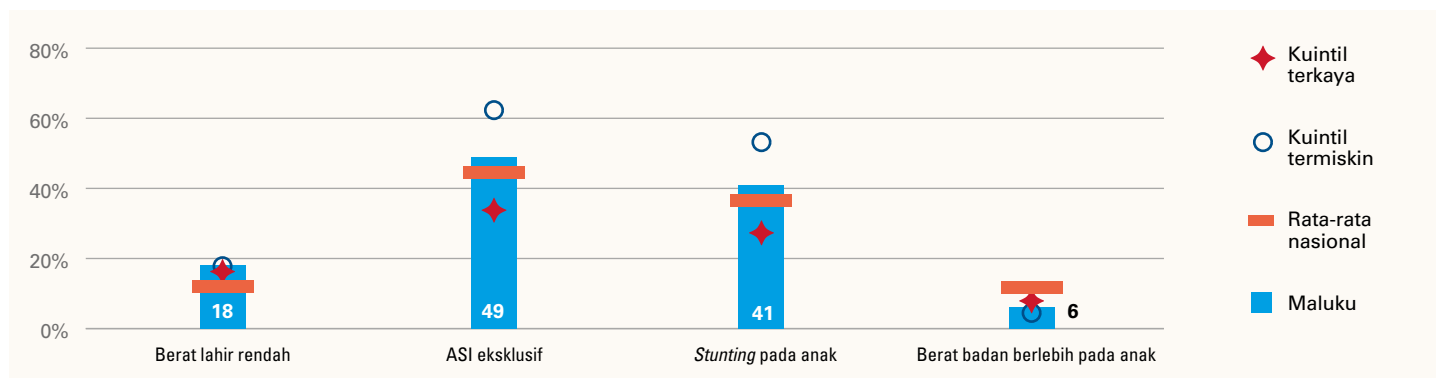
TUJUAN 2 PENGENTASAN KELAPARAN



Menerapkan praktik pemberian makan yang optimal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Hampir setengah dari semua bayi di Provinsi Maluku diberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupannya, yang berarti hanya sedikit di atas angka rata-rata nasional.

Prevalensi malnutrisi relatif tinggi, termasuk di wilayah perkotaan. Sekitar 18 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, dan lebih dari empat di antara 10 anak di bawah lima tahun mengalami *stunting* (tinggi badan rendah dibanding usia) pada 2013.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dalam hasil pemberian makanan dan gizi anak



TUJUAN 3

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN



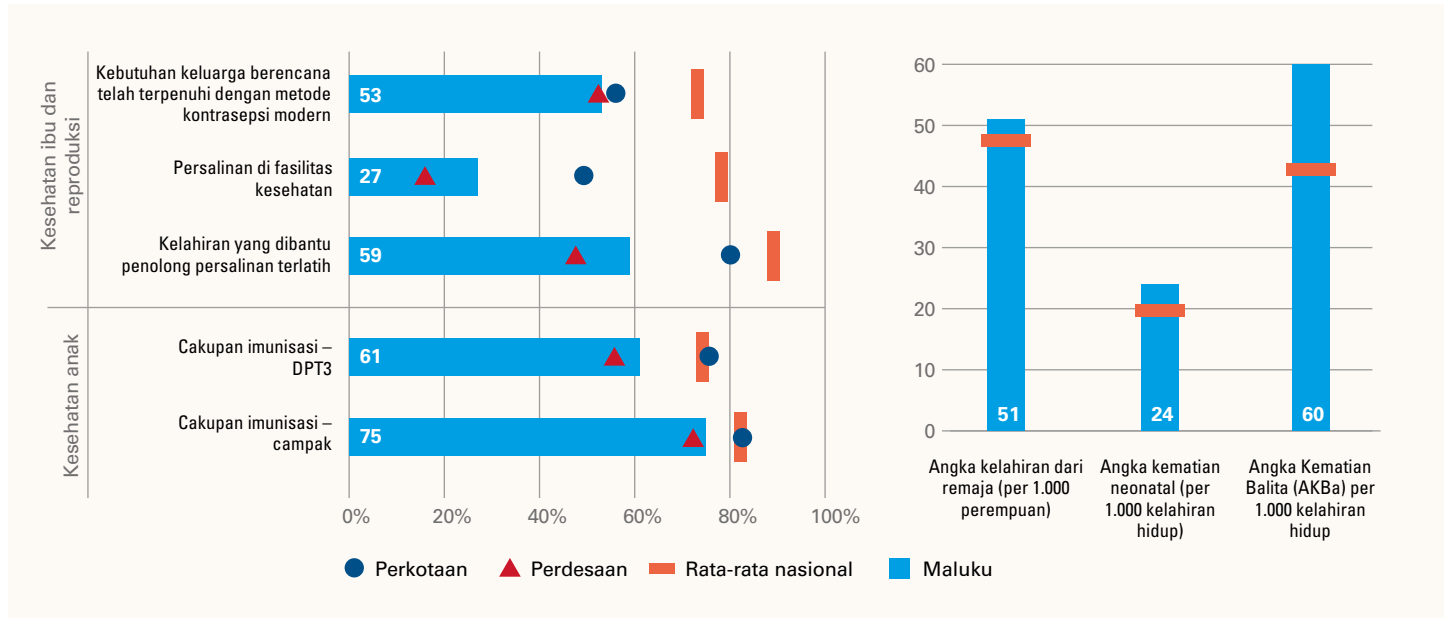
Meskipun sudah ada kemajuan, angka kematian anak masih menjadi tantangan yang signifikan. Untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, 24 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan dan 60 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Peningkatan akses perempuan terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting. Hanya setengah dari perempuan dewasa dan remaja usia 15–49 tahun yang kebutuhan keluarga

berencananya terpenuhi dengan metode modern pada 2015, dan hanya 59 persen kelahiran dibantu oleh penolong persalinan terlatih. Tingkat akses lebih rendah bagi ibu dan anak di wilayah perdesaan.

Diperlukan upaya terus-menerus untuk mencapai dan mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi. Pada tahun 2015, 61 persen bayi menerima tiga dosis vaksin DTP yang dianjurkan, dan tiga per empat bayi menerima vaksinasi campak.

Ketimpangan berdasarkan wilayah pada kesehatan ibu dan anak



TUJUAN 4

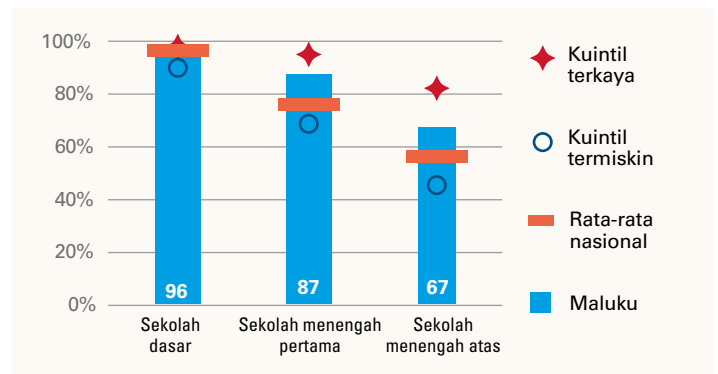
PENDIDIKAN BERKUALITAS



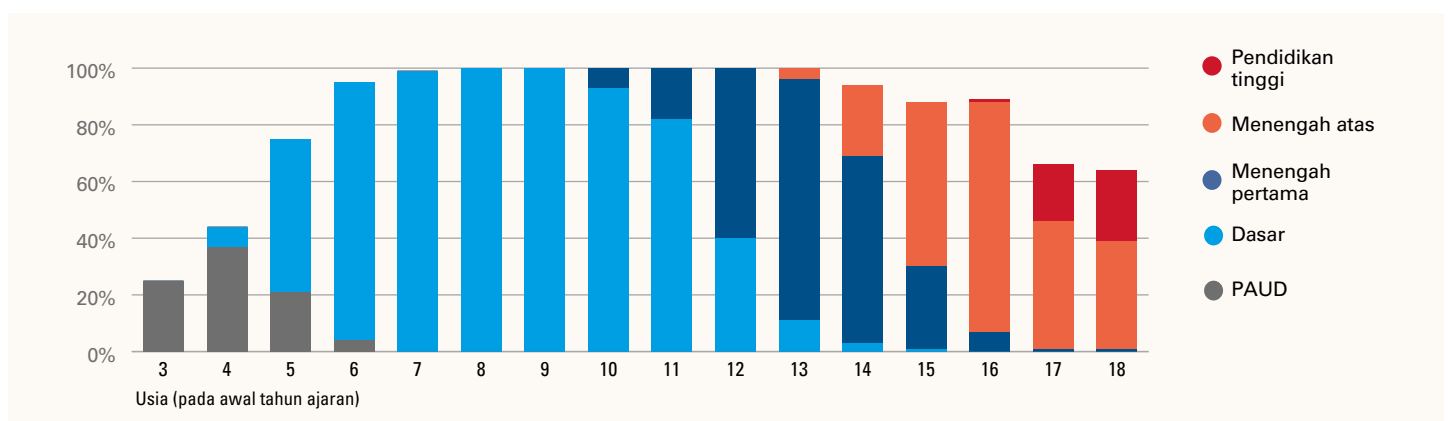
Kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar dapat ditingkatkan dengan memasukkan anak ke program perkembangan anak usia dini. Angka partisipasi dalam pembelajaran PAUD yang terorganisir di kalangan anak usia 6 tahun mencapai 95 persen pada 2015, meskipun sebagian besar anak usia pra-sekolah sudah masuk sekolah dasar. Provinsi Maluku hampir mencapai akses universal pendidikan dasar. Namun, anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang jauh lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang paling kaya.

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Sekitar sepertiga anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan 12 persen anak dalam kemampuan matematika.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada angka penyelesaian sekolah



Persentase anak-anak yang masuk sekolah berdasarkan usia



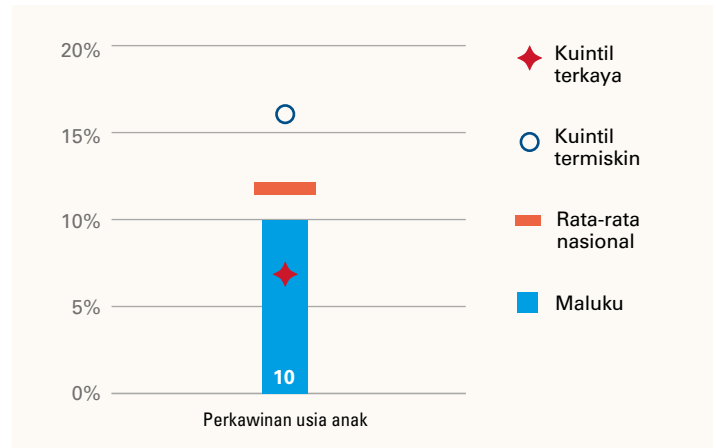
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER



Praktik perkawinan usia anak telah menurun. Di Provinsi Maluku, 10 persen perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun pada 2015. Tingkat perkawinan usia anak lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin.

Tidak ada data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat provinsi. Namun, data dari survei nasional menunjukkan bahwa jenis kekerasan ini tersebar luas: Sebanyak 28 persen dari perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan oleh mantan atau pasangan intimnya saat ini.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada perkawinan usia anak



10% perempuan menikah sebelum berusia **18**

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI

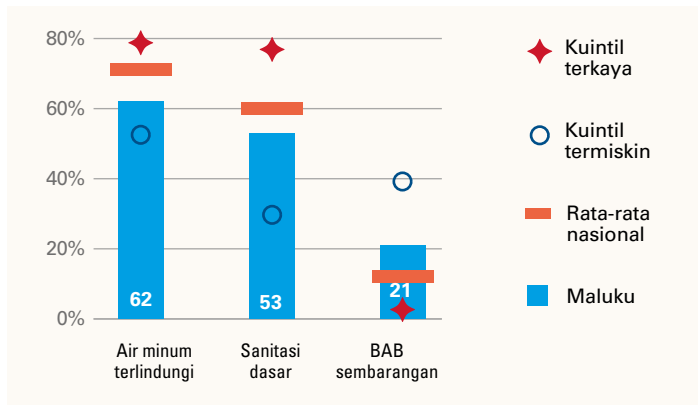


Pencapaian akses universal terhadap air minum, sanitasi, dan kebersihan sangat penting untuk mempercepat kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2015, sekitar 62 persen dari jumlah penduduk menggunakan fasilitas sanitasi dasar di rumah, sementara satu dari lima orang masih mempraktikkan BAB sembarangan. Hanya 27 persen sekolah sudah memiliki fasilitas toilet terpisah untuk laki-laki dan

perempuan. Cakupan sumber air minum yang layak sudah lebih tinggi, baik di rumah tangga maupun sekolah.²

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dan tempat tinggal sangat mencolok, yang menunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan ke dalam kebijakan dan praktik serta memperluas cakupan program sanitasi total berbasis masyarakat.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada akses air dan sanitasi



sekolah dengan layanan air dasar = **73%**

Lingkungan sekolah

Sekolah dengan layanan air dasar (%)	73
Sekolah dengan fasilitas sanitasi terpisah menurut jenis kelamin (%)	27

Komunitas

Desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	8
--	---

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

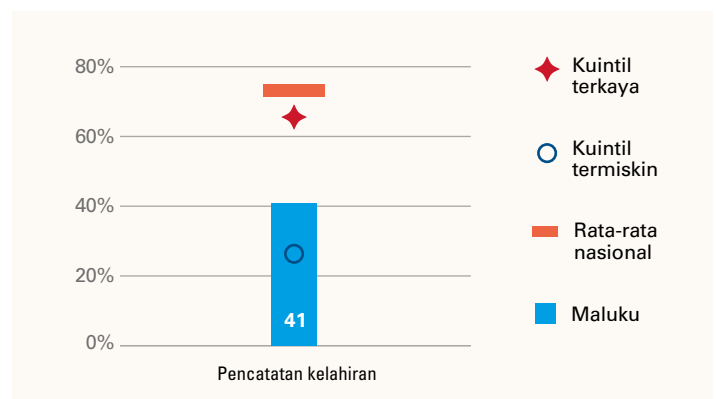


Peningkatan angka pencatatan kelahiran perlu dipercepat: enam dari 10 anak berusia di bawah 5 tahun belum memiliki akta kelahiran pada tahun 2015. Masih terdapat perbedaan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan berdasarkan status kekayaan rumah tangga, yang disebabkan hambatan keuangan dan ketersediaan pelayanan (*supply-side barriers*).

Anak dalam tahanan masih menjadi bentuk hukuman yang umum bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini melanggar prinsip bahwa penahanan anak harus merupakan pilihan terakhir. Di Provinsi Maluku, 6 persen dari seluruh anak yang ditahan belum mendapatkan putusan pengadilan, yang berarti lebih baik daripada sebagian besar provinsi lain.

Hanya ada sedikit atau tidak ada data sama sekali tentang masalah perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak maupun perdagangan anak.

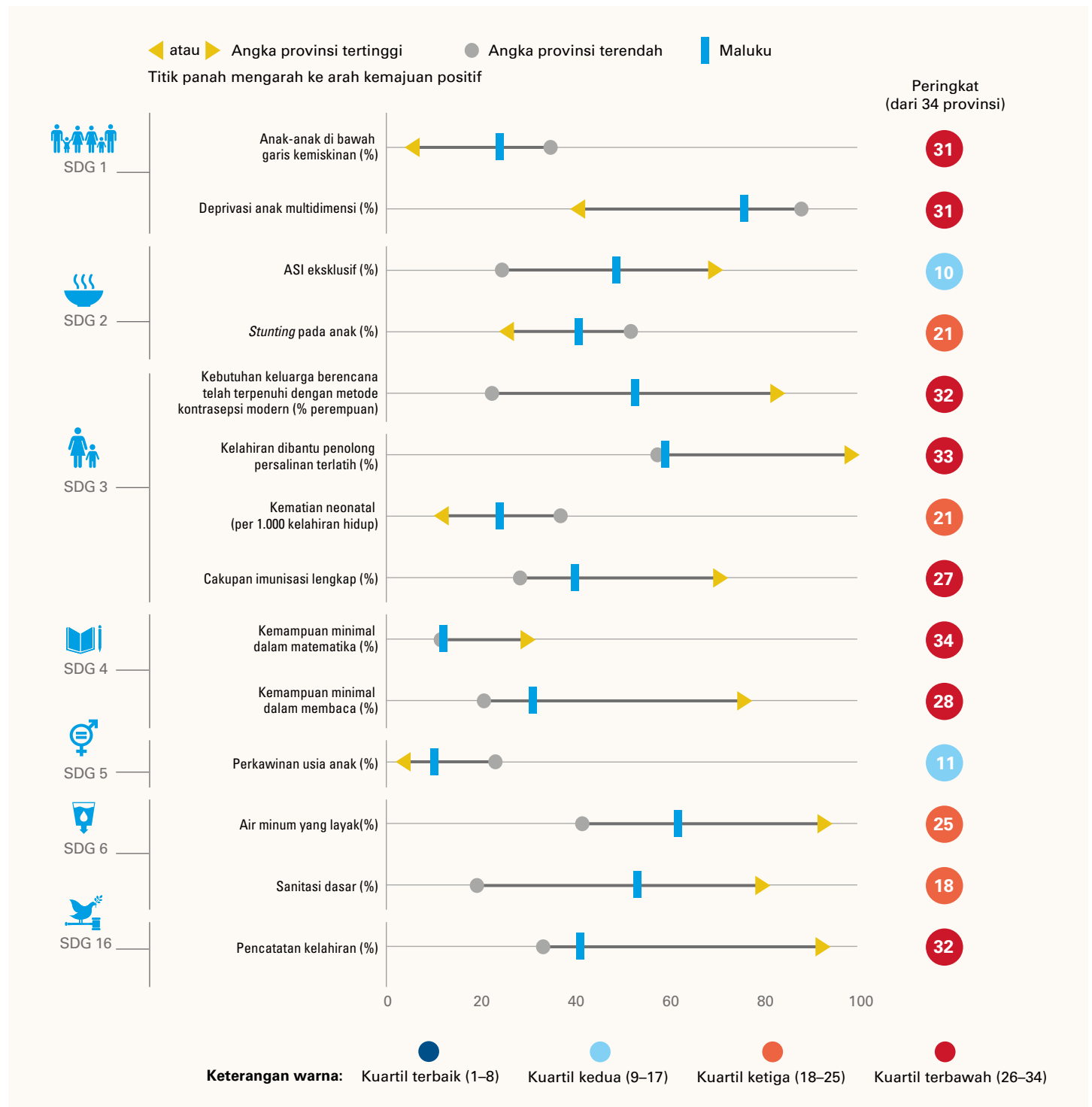
Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada pencatatan kelahiran



KARTU NILAI (SCORECARD) PROVINSI

Kartu nilai ini berisi ringkasan kinerja Provinsi Maluku dalam beberapa indikator SDG dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Grafik di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata Provinsi Maluku dan provinsi-provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah untuk tiap indikator.

Di sisi kanan tercantum peringkat Provinsi Maluku untuk setiap indikator, yaitu antara peringkat 1 untuk kinerja tertinggi dan 34 untuk kinerja terendah. Provinsi yang ada dibagi menjadi empat kuartil (biru untuk kuartil tertinggi dan merah untuk kuartil terendah).



Catatan

Sumber: Survei rumah tangga nasional (SUSENAS, RISKESDAS, SDKI) dan data administratif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan). Informasi detail tentang sumber data dan definisi indikator tersedia *online* di: <https://sdg4children.or.id>

- 1 Kemiskinan anak multidimensi didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami deprivasi pada setidaknya dua dimensi berikut: pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perumahan; air dan sanitasi; dan perlindungan.
- 2 Saat ini, Indonesia masih belum memiliki data nasional yang representatif tentang kualitas air yang dapat digunakan untuk menghitung indikator SDG terkait penggunaan layanan air minum yang dikelola secara aman. Namun setidaknya telah digunakan indikator *proxy* dalam menyusun *baseline data* untuk SDG 6.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di: jakarta@unicef.org